Bupati Kudus Minta Guru Jadi Teladan Yang Baik Bagi Muridnya

KUDUS - Sebagai seorang guru harus bisa menjadi teladan bagi setiap siswanya. Hal itu disampaikan oleh Bupati Kudus, Hartopo di hadapan 500 guru ketika mengikuti Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Gedung Budaya Bae, Selasa (27/12).

"Seorang guru harus bisa jadi teladan yang baik untuk muridnya. Ibarat kata guru kencing berdiri, murid kencing berlari," ucapnya.

Hartopo meminta Peraturan Pemerintah Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil harus selalu dipedomani, baik dalam pengabdian ataupun ketika berada di lingkungan masyarakat.

"Peraturan dibuat untuk dipedomani dan ditindaklanjuti. Terapkan dalam kehidupan sehari-hari baik ketika bekerja ataupun di lingkungan masyarakat," tegasnya.

Penekanan tersebut bukan tanpa sebab, menurut hasil laporan yang ia terima, dalam tahun ini telah terjadi kasus pelanggaran disiplin yang kebanyakan dilakukan oleh oknum guru sebanyak 22 kasus.

"Saya telah mendapat informasi bahwa telah terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh guru, 9 diantaranya telah masuk ranah sanksi," katanya.

Menurutnya, sebagian besar kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil ditimbulkan akibat kasus perceraian hingga perselingkuhan. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau agar sebagai seorang abdi negara harus selalu fokus menjalankan tugasnya dalam pengabdian.

"Saya minta jangan sampai terulang kembali kejadian ini. Sebagai abdi negara kita harus fokus dalam pelayanan pada masyarakat. Perbaiki dan selalu introspeksi diri, semoga ke depan kita dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi," harapnya.

Hartopo juga menyoroti terkait banyaknya laporan masyarakat terkait masih ditemukannya PNS yang meninggalkan kantor dalam jam kerja tanpa dilengkapi surat izin yang jelas.

"Banyak laporan masyarakat, bahwa ada oknum PNS yang 'kluyuran' di pusat keramaian bahkan hingga keluar kota saat jam kerja tanpa dilengkapi surat izin yang jelas. Ini menjadi koreksi tersendiri bagi kita," jelasnya.

Menyikapi hal tersebut, Bupati Hartopo melalui Sekda telah mengeluarkan surat edaran untuk seluruh dinas agar membuat form surat izin keluar yang wajib dibawa oleh seorang PNS ketika sedang meninggalkan pekerjaannya dengan izin yang jelas dan diketahui atasan.

"Kami instruksikan pada seluruh dinas-dinas bahwa harus membuat form surat izin keluar untuk pegawainya dengan tujuan jelas dan diketahui pimpinan. Jika dilanggar maka akan ada sanksi," tandasnya.

Ketua DPRD Kudus, Masan menambahkan bahwa seorang guru menjadi tolak ukur keberhasilan anak didiknya di masa mendatang. Oleh karena itu, sebagai seorang guru harus bisa dipegang perkataan dan ditiru perbuatan atau tingkah lakunya.

"Keberhasilan murid panjenengan menjadi tolak ukur panjenengan dalam mendidik dan mencerdaskan mereka. Oleh karena itu, sebagai seorang guru harus bisa 'di gugu lan di tiru', artinya harus bisa dipegang perkataan dan ditiru perbuatan atau tingkah lakunya," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BKPP Kudus, Putut Winarno menyebut bahwa peserta diikuti oleh 500 guru yang terdiri dari 5 korwil di Kabupaten Kudus, meliputi Kecamatan Dawe, Kecamatan Jati, Kecamatan Kota, Kecamatan Undaan, dan Kecamatan Jekulo.

"Untuk peserta terdiri dari 5 Korwil sebanyak 500 guru, meliputi Kecamatan Dawe sebanyak 200 orang, Jati sebanyak 100 orang, Kota sebanyak 100 orang, Undaan sebanyak 50 orang, dan Jekulo sebanyak 50 orang," sebutnya.

Putut menambahkan, Kegiatan ini dilaksanakan pada seluruh ASN agar dapat meminimalisir pelanggaran yang dilakukan serta memberikan informasi tentang peraturan pemerintah terkait disiplin pegawai.

"Sebagai bentuk langkah preventif dan antisipatif sehingga tidak ada pelanggaran yang mengakibatkan dijatuhinya hukuman disiplin untuk pegawai," tutupnya. (\*)